

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini akan membahas terkait dengan relasi antara partai politik dengan pondok pesantren dalam proses perumusan hingga pembahasan raperda di tingkat Provinsi. Penelitian ini berjalan didukung untuk mengetahui bagaimana pola relasi yang terjadi antara keduanya yang dimana nantinya didukung oleh sebab akibat dan dampak dari hubungan relasi antara kedua belah pihak. Penelitian ini dilaksanakan pada saat proses perumusan Raperda di Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur.

Relasi antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Pesantren Syaichona Moch Cholil ini sudah terjalin lama dan memiliki hubungan sangat erat dimasa reformasi. Bentuk relasi mereka terlihat banyak melalui kegiatan baik di partai maupun di pesantren. Kegiatan relasi yang terjadi di pesantren yang memperlihatkan relasinya seperti halnya adanya kunjungan dari Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan adanya kunjungan dari Khofifah Indarparawansa. Kegiatan pada partai politik yang terlihat seperti datangnya para pemimpin pesantren sebagai partisipan maupun simpatisan saat pemilihan. Namun, berdasarkan data yang penulis dapat, yang menjadi dasar relasi antara PKB dengan pesantren Syaichona Cholil ialah keduanya memiliki hubungan kekeluargaan, persamaan ideologi islam dan saling membutuhkan keuntungan dari segi apapun.

Baru-baru ini anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi Jawa Timur yang tergabung dalam fraksi PKB mengusulkan untuk adanya kebijakan mengenai pesantren yang mana kebijakan ini nantinya akan menjadi turunan dari Undang-Undang Pesantren yakni Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019. Fraksi PKB menjadi inisiator pertama adanya perumusan kebijakan untuk pesantren yang dikhususkan untuk wilayah Jawa Timur. Dalam tiap proses penyusunannya, terjadi beberapa polemik, salah satunya terkait dengan jumlah pesantren yang tidak relevan dengan jumlah yang dimiliki oleh Kanwil Kemenag Jawa Timur. Kebijakan ini diinisiasi oleh PKB sebagai “hadiah” yang diberikan untuk kiai dan pesantren yang memang telah menemani dan memberikan doa yang terus mengalir untuk berjalannya kontestasi yang dijalankan oleh partai PKB. Tak hanya itu saja, dalam perumusan kebijakan ini, di Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur juga mengikut sertakan ormas lain selain Nahdlatul Ulama (NU) yakni seperti PW Muhammadiyah Jawa Timur, PW LDII Jawa Timur yang diundang melalui *stakeholder* disetiap wilayah di Jawa Timur. Adanya kebijakan ini dapat dijadikan sebagai salah satu contoh bahwa upaya PKB untuk terus merangkul kiai hingga pesantren yang menjadi peninggalan kultur agama yang dimiliki oleh masyarakat Nahdlatul Ulama di masanya.

Selain itu, adanya perumusan kebijakan ini juga didukung oleh program unggulan yang diciptakan oleh Gubernur Jawa Timur yakni Khofifah Indarparawansa yakni program *One Pesantren One Product*. Program ini merupakan bagian kecil dari proses kesejahteraan untuk pesantren yakni dengan mengembangkan Usaha Menengah

Kecil Mikro (UMKM) di setiap pesantren di Jawa Timur. Dengan adanya OPOP ini dapat menyumbangkan peningkatan daya pembangunan Jawa Timur khususnya dalam tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

PKB sama halnya dengan partai politik lainnya yang mana di dalam kehidupannya berusaha untuk mencari massa melalui jalur pesantren yang memiliki basis agama islam. Dalam hal ini pesantren sering dijadikan sebagai alat pada saat kontestasi politik. Untuk itu perlu adanya tinjauan lebih terkait dengan peran dari pesantren dan apa yang diinginkan oleh setiap partai politik yang masuk dalam pesantren.

Relasi politik yang dilakukan oleh partai politik di tingkat daerah pada umumnya memiliki tujuan untuk mendapatkan dukungan dalam berbagai hal politik yang nantinya jdapat dibawa ke tingkat parlemen untuk kebutuhan dan keuntungan kedua belah pihak. Seperti halnya di Jawa Timur saat ini, memiliki jumlah pesantren terbanyak setelah Banten dan adanya keikutsertaan pesantren dalam proses politik membuat sebagian besar partai politik memiliki jalinan relasi dengan masyarakat di lingkungan pesantren demi untuk mendapatkan keuntungan.

Pondok Pesantren Syaichona Moch. Cholil merupakan salah satu pondok pesantren terbesar di Bangkalan, Madura. Pesantren ini juga termasuk pesantren yang memiliki usi tertua se Nusantara yang juga menghasilkan banyak alim ulama yang terlahir dari dalam asuhan dan didikan pesantren Syaichona Moch Cholil. Pesantren

merupakan Lembaga yang memiliki peran khusus di dalam Pendidikan khususnya Pendidikan islam yang menanamkan nilai-nilai keagamaan, keilmuan, pelatihan, pengembangan yang sesuai dengan kaidah dan ajaran agama islam.

Dalam pembahasan pesantren, di dalamnya pasti dipimpin oleh kiai. Para kiai ini umumnya memiliki kelebihan dan kharismatik yang bersumber dari bakat yang dianugerahkan maupun diturunkan. Oleh karena nya, pesantren dengan pemimpinnya ini menjadi panutan bagi masyarakat di lingkungan pesantren. Kelebihan yang dimiliki oleh kiai inilah yang biasanya dimanfaatkan oleh berbagai pihak termasuk pihak pemerintahan dan juga partai politik untuk mendapatkan suara dan dukungan yang besar.

Seiring berkembangnya zaman, akan ada saatnya terjadi transformasi yang mana akan ada program pembangunan yang masuk ke pesantren melalui legitimasi kekuasaan kiai agar program ini sukses dan sesuai dengan tujuan dari pembangunan. Upaya pemerintahan atau partai politik ini mau tidak mau telah memberikan posisi pada pesantren sebagai salah satu yang memberikan keuntungan dan memberikan keuntungan pula bagi kaum santri¹. Selain itu, di dalam pesantren juga memiliki hubungan antara pesantren dan masyarakat yang dapat menjadi manfaat baik oleh partai politik. Dimana partai politik ini merupakan sebuah kelompok yang memiliki struktur secara terorganisir yang anggota-anggotanya ini memiliki orientasi dan tujuan

¹ Abdul Wahid Zaini, *Moralitas Pendidikan Pesantren*, Yogyakarta: Lembaga Kajian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia, 1996. Hal.3

yang sama. Tujuan inilah yang dibawa oleh partai politik untuk mendapatkan kekuasaan politik dan dilakukan untuk merebut kedudukan politik².

Dalam setiap proses politik, apabila melibatkan pesantren maka juga membahas aspek-aspek yang ada di dalamnya. Terdapat tiga aspek yang wajib di bahas jika membahas pesantren, yakni kiai, santri dan pondok. Ketiga aspek ini merupakan pondasi utama dari keberadaan pesantren yang memiliki hubungan timbal balik³. Sifat timbal balik di dalam lingkungan pesantren ini cukup kuat seperti adanya difat patron-klien yang secara tidak langsung dapat memberikan bentuk pola pikir santri dalam mempertimbangkan setiap keputusan khususnya keputusan politik. Tradisi pesantren dengan istilah *sami'na wa atho'na* ini sangat diperhatikan sekali oleh para santri di dalam setiap prosesnya dalam menuntut ilmu agar mendapatkan barokah dan ilmu yang bermanfaat tanpa adanya *kualat*.

Penelitian terkait dengan hubungan relasi partai politik dan pondok pesantren sebelumnya juga pernah diteliti oleh Fikri Husnur Rijal (2019). Fikri meneliti terkait dengan relasi dari partai PKB dengan pondok pesantren Miftahul Huda Al-Azhar di Kota Banjar yang mana relasi yang terjadi karena adanya peran-peran yang dimiliki oleh para Kiai yakni KH Mudzakir yang memiliki kekuasaan besar dalam kehidupan islam di Kota Banjar. Selain itu, didukung dengan adanya penelitian bahwa sering

² Miriam Budiarjo, Revisi, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008. Halm. 403-404

³ Vanni MT, Lingkar Politik Pesantren: Membaca Perubahan Situasi dan Perilaku Politik Kiai Tahun 1971-2014, Malang: MafiA Press, 2017. Halm. 02

adanya kunjungan yang dilakukan oleh Muhaimin Iskandar atau yang sering disapa dengan Cak Imin dan mendeklarasikan dirinya sebagai Wakil Presiden Joko Widodo.⁴

Kedua, terdapat penelitian lain terkait dengan partai politik yang memiliki hubungan erat dengan pondok pesantren yakni penelitian yang dilakukan oleh Vanni Anggara MT (2017) tentang Lingkaran Politik Pesantren yang di dalamnya menjelaskan bahwa adanya sifat patron-klien yang cukup kuat di dalam lingkungan pondok pesantren. Adanya proses keikutsertaan para santri di dalam pondok pesantren ini yang cukup kuat dalam proses hubungan politik di dalam pesantren. Dengan sebutan *sami'na wa atho'na* yang dijunjung tinggi oleh para santri untuk tetap patuh dan taat kepada perintah kiai dalam proses menuntut ilmu dengan hasil barokah ilmu. Dalam penelitiannya, penulis juga memberikan satu pondok pesantren yang masih kental dengan ajaran Nahdlatul Ulama, yakni Pesantren Tebu Ireng Jombang yang masih kental dan erat dengan proses politik di dalamnya.⁵

Ketiga, penelitian tentang relasi yang terjadi antara partai politik PKB dalam proses penjarinan calon Bupati Sumenep tahun 2015 yang ditulis oleh Ainur Rohmatin yang juga menyebutkan bahwa melibatkan para elit agama dan relasi ini bersifat patron-klien yang cukup kuat. Hubungan yang terjadi antar kiai dan partai PKB ini terbentuk dari adanya kesadaran secara kritis yang muncul dari kiai dalam

⁴ Fikri Husnur Rijal (2019), Relasi Partai Politik Dengan Pesantren (Studi Kasus Partai Kebangkitan Bangsa dengan Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo Kota Banjar), Thesis, Universitas Siliwangi

⁵ Vanni Anggara MT (2017), Lingkaran Politik Pesantren: Membaca Perubahan Situasi dan Perilaku Politik Kiai Tahun 1971-2014, Mafia Press.

menanggapi dinamia politik yang menjadikan PKB ini sebagai partai politik yang dapat memberikan aspirasi kepada para kiai⁶.

Keempat, terdapat penelitian yang digunakan bahan penelitian oleh penulis yakni penelitian yang dilakukan oleh Greetz dengan membawa konsep Wolf. Di dalam penelitiannya, beliau memberikan pandangan bahwa kiai di Jawa ini memiliki posisi sebagai pialang budaya. Penelitian ini kemudian dijadikan buku oleh Greetz dengan judul *Santri, Abangan dan Priyayi*⁷.

Kelima, penelitian yang sama juga dilakukan oleh ilmuwan Jepang yakni Hirokho Horikoshi. Penelitian dilakukan di wilayah Jawa Barat dengan fokus kajian tentang peran kiai (ajengan). Dalam penelitiannya disebutkan bahwa kiai yang memiliki kecakapan pasti memiliki kemampuan untuk masuk dalam ranah kekuasaan sehingga menjadikan dominasi. Selain itu, beliau juga menyebutkan bahwa kiai yang memiliki kharismatis besa merupakan kiai yang memiliki peranan yang cukup besar dalam melakukan transformasi perubahan. Sebaliknya, jika terdapat kiai yang memiliki kharismatis yang cukup lemah, maka peranan yang dimiliki tidak cukup besar⁸.

Keenam, penelitian serupa juga dilakukan oleh Dhofier dengan judul *The Pesantren Traditional a Study of the Role of the Kiai in Maintenance oh the Traditional*

⁶ Ainur Rohmatin, Relasi Informal dan Formal Politik PKB dalam Penjaringan Calon Bupati Sumenep Tahun 2015, Jurnal Politik Muda, Vol. 05, No. 2, April-Juli 2016, 233-246

⁷ Clifford Geertz, *Abangan, Santri dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1983

⁸ Hirokho Horikoshi, *Kiai dan Perubahan Sosial*, Jakarta: P3M, 1987, H. 211-236

Ideology of Islam in Java tahun 1980⁹. Penelitian ini membahas terkait dengan usaha yang dilakukan oleh kiai untuk menjaga tradisi pesantren. Dalam penelitiannya, Dhofier menjelaskan bahwa kiai memiliki jaringan yang sengaja untuk diciptakan untuk mempertahankan tradisi dari pesantren.

Untuk mencapai tujuannya dalam melangsungkan perumusan kebijakan, partai politik juga membutuhkan dukungan untuk menampung aspirasi rakyat. Seperti halnya PKB sebagai partai politik yang melaksanakan fungsinya sebagai partai politik yang telah duduk di parlemen yakni aspirasi rakyat khususnya masyarakat pesantren. Dukungan yang diberikan ini tidak jauh dari dukungan dari kiai yang ada di dalam pesantren.

Dari adanya gagasan diatas, penulis tertarik untuk mengetahui terkait dengan relasi yang ada antara PKB dengan pesantren Syaichona Moch. Cholil Bangkalan dalam pembahasan raperda khususnya tentang pesantren. Yang mana, hal ini didukung dengan adanya pembuatan kebijakan publik tentang pesantren di Provinsi Jawa Timur. Kebijakan tentang pesantren ini masih menjadi pembahasan yang prioritas di dalam DPRD Provinsi Jawa Timur. Pada tanggal 6 Juni 2022 kemarin, Raperda ini telah disahkan oleh Gubernur Jawa Timur namun masih menjadi probematika di dalam Gedung legislatif.

⁹ Zamakhsari Dhafir, Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai, Jakarta: LP3ES, 1982

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka peneliti merumuskan pertanyaan yang menjadi pokok dari penelitian, sebagai berikut :

1.2.1 Bagaimana hubungan antara PKB dan pesantren Syaichona Moh Cholil terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang pesantren Jawa Timur?

1.2.2 Apa bentuk relasi yang terbangun antara PKB dan pesantren Syaichona Moh Cholil ketika proses perumusan Rancangan Peraturan Daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara partai politik khususnya PKB dengan Pondok Pesantren terhadap lahirnya peraturan daerah yang mengatur tentang pesantren di Jawa Timur.

1.3.2 Untuk mengetahui pola relasi apa yang terbangun di dalam hubungan partai politik khususnya PKB dengan pondok pesantren ketika proses perumusan peraturan daerah

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Akademis

Penelitian ini bermanfaat untuk menerapkan ilmu dan teori yang selama ini diambil sebagai landasan dan penjelasan dari mahasiswa ilmu politik yakni dengan

teori patron klien yang terjadi dalam antara partai politik dengan ponsok pesantren dalam merumuskan sebuah kebijakan publik.

1.4.2 Praktis

Penelitian ini secara praktis memberikan manfaat sebagai penambah ilmu tentang teori patron klien sebagai landasan dari relasi partai politik dengan menghadirkan raperda sebagai sebuah kepentingan suatu partai politik

1.5 Kerangka Konsep

1.5.1 Partai Politik

Partai politik di Indonesia memiliki posisi yang sangat mendukung karena di Indonesia sendiri memiliki kebebasan secara demokrasi. Kebebasan demokrasi ini merupakan salah satu terwujudnya pelaksanaan hak asasi manusia yang berserikat dan mengutarakan pendapatnya. Melalui partai politik, pemilihan umum ini dilaksanakan untuk berjalannya proses demokrasi sebagai sebuah sistem “*an institutional arrangement for arriving at political decisions by mean competitive for the people’s vote*”¹⁰.

Sigmund Neuman dalam bukunya “*Modern Political Parties*” juga mendefinisikan terkait dengan partai politik adalah sebuah organisasi yang dibentuk dari para aktivis politik dengan tujuan untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta

¹⁰ Ricardo Blaug and John Schwarzmantel dikutip oleh M.Ali Safa’at, Pembubaran Partai Politik, Rajawali Press, Jakarta 2011 hlm. 07

merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan pandangan setiap golongan yang berbeda.¹¹

Dalam bukunya, Miriam Budiarto juga mengemukakan definisi dari partai politik yakni merupakan kelompok yang secara terorganisir memiliki anggota yang juga memiliki orientasi dan tujuan yang sama. Adapun tujuan dari kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik yang dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagai persaingan kedudukan politik. Kedudukan politik ini nantinya akan digunakan untuk menjalankan kebijakan yang telah disusun.¹²

Sigit Pamungkas juga memberikan pernyataan terkait dengan definisi dari Partai Politik yakni sebuah organisasi yang terbentuk untuk memperjuangkan nilai dan ideologi dengan cara membentuk kekuasaan secara terstruktur yang diperoleh dalam keikutsertaannya di pemilihan umum.¹³

Ramlan Surbakti di dalam bukunya juga mendefinisikan tentang partai politik yang merupakan kelompok yang terorganisir secara rapi yang disatukan di dalam satu tujuan dan ideologi yang sama. Tujuannya yakni untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum sebagai alternatif pelaksanaan pembuatan kebijakan umum yang disusun.¹⁴

¹¹ Sigmund Neuman, "Modern Political Parties" dalam *Comparative Politics: A Reader*, diedit oleh Harry Eckstein dan David E. Apter (London: The Free Press of Glencoe, 1963) hlm. 352

¹² Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi (Jakarta: Gramedia, 2008)

¹³ Sigit Pamungkas, *Partai Politik: Teori dan Praktek di Indonesia*, Yogyakarta: Institute Democracy and Welfarism, 2011. Hlm.5

¹⁴ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Jakarta: Gramedia, 2010, Hlmn. 148

1.5.1.1 Fungsi Partai Politik

Seperti organisasi lainnya, partai politik juga memiliki fungsi peran dan tugas yang dipertanggungjawabkan, Secara garis besar, fungsi utama dari partai politik yakni mencari dan mempertahankan kekuasaan yang nantinya digunakan untuk merealisasikan program yang telah diciptakan sesuai dengan ideologi yang dibawa.¹⁵ Pemilihan Umum menjadi salah satu media yang digunakan partai politik untuk mempertahankan dan mencari kekuasaan. Selain itu, cara lain juga dapat dilakukan dengan adanya paksaan fisik maupun psikologis. Fungsi dari partai politik secara khusus juga memiliki dua fungsi pokok yakni, secara fungsi internal partai politik itu sendiri seperti adanya kaderisasi, edukasi, pembinaan. Kedua, fungsi dari partai politik sendiri kepada masyarakat. Berikut ini merupakan fungsi dari partai politik, menurut Ramlan Surbakti (2010) :

a. Sosialisasi Politik

Setiap partai politik memiliki fungsi untuk memberikan orientasi politik kepada masyarakat. Dari proses inilah, setiap anggota masyarakat akan menjadi paham dan menjadi mengerti terkait dengan orientasi di dalam kehidupan politik. Proses ini dapat dilakukan dengan adanya kontak di dalam kehidupan masyarakat yang berlangsung seumur hidup. Sosialisasi politik dibagi menjadi dua yakni Pendidikan politik yang dilakukan dengan cara memperkenalkan

¹⁵ Ibid. 149

nilai-nilai politik melalui dialog Pendidikan, pemerintah hingga partai politik. Kedua, indoktrinasi politik merupakan cara yang digunakan dengan melibatkan paksaan dan doktrinasi untuk menerima nilai, norma hingga simbol kekuasaan.

b. Rekrutmen Politik

Merupakan seleksi atau pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk menjalankan peranan di dalam sistem politik dan pemerintahan. Fungsi ini memiliki porsi yang besar, dimana partai politik sebagai badan perwakilan rakyat yang memiliki kewenangan dalam menjalankan bentuk pemerintahan. Fungsi ini merupakan salah satu bentuk untuk mempertahankan kekuasaan.

c. Partisipasi Politik

Kegiatan warga negara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan menentukan pemimpin pemerintahan.¹⁶ Dalam fungsi ini, partai politik menjadi wadah dari aspirasi masyarakat yang nantinya akan disalurkan dalam kegiatan politik.

d. Komunikasi politik

Partai politik memiliki fungsi sebagai komunikator politik yang dimana nanti akan menyampaikan segala keputusan dan penjelasan pemerintah sebagai salah satu bentuk aspirasi dan kepentingan berbagai kelompok.

¹⁶ Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Edisi Revisi, Jakarta: Gramedia, 2010, Hlmn. 151

e. Agregasi Politik

Secara fungsi, partai politik juga memiliki fungsi sebagai agregasi politik yang mana partai politik memiliki upaya yang dikehendaki untuk kepentingan masyarakat. Kepentingan tersebut nantinya akan diupayakan ke dalam fungsi partai politik sebagai artikulasi

f. Artikulasi politik

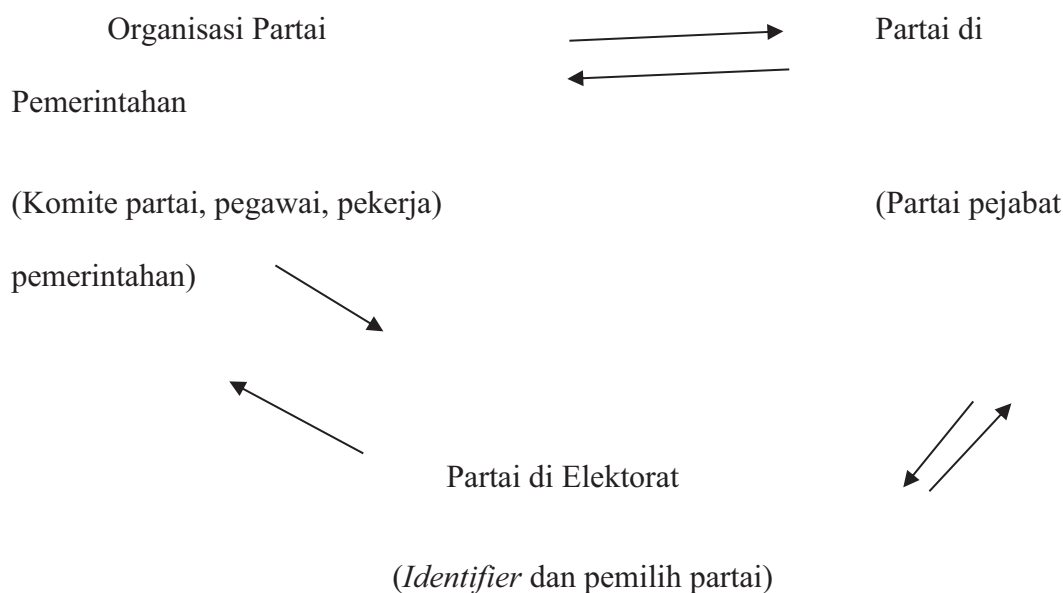
Partai politik memiliki fungsi sebagai artikulasi politik yang nantinya akan menyuarakan kepentingan dari masyarakat menjadi sebuah usulan dalam bentuk kebijakan yang disampaikan kepada pemerintah dan dijadikan sebagai kebijakan umum.

Partai politik juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan masyarakat, salah satunya dengan adanya artikulasi kepentingan. Kepentingan yang diciptakan ini seharusnya diserap baik oleh sebuah partai politik yang mana nantinya akan menjadi ide, gagasan dan berbuah menjadi kebijakan-kebijakan partai politik. Kebijakan atau aspirasi tersebut nantinya akan diadvokasikan dan diharapkan mampu membawa pengaruh dan menjadi hal yang penting dalam kebijakan kenegaraan. Fungsi partai politik lainnya ialah sebagai pengatur dan pengelola konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Dapat dikatakan bahwa, berdirinya partai politik yang bermula dari nilai dan kepentingan ini diambil dari kehidupan masyarakat yang sangat beragam, saling bersaing hingga bertabrakan antara kepentingan yang satu dengan yang lain. Peran dan posisi partai politik dalam fungsi ini menjadi satu sebuah masalah, yang mana dari jumlah partai politik yang ada akan memberikan banyaknya kepentingan yang berbeda

dengan cara setiap partai politik memberikan tawaran yang berbeda dari segi ideologi, program, kebijakan yang berbeda antara satu dengan lainnya. Agregasi kepentingan yang menjadi peran penting dari partai politik ini berguna untuk menyalurkan kepentingan-kepentingan yang berbeda melalui kelembagaan partai politik. Yves Meny dan Andrew Knapp mengkategorikan fungsi partai politik ini sebagai fungsi agregasi dan integrasi politik dengan cara menyalurkan kepentingan-kepentingan untuk mempengaruhi kebijakan politik dalam negara.¹⁷

Bagan 1.1

Diagram Tiga Bagian Partai Politik



Sumber: Partai Politik (Sigit Pamungkas, 2011:16)

¹⁷ Asshiddiqie Jimly, *Dinamika Partai Politik dan Demokrasi*, diunduh dari http://www.jimly.com/makalah/..DINAMIKA_PARTAI_POLITIK.doc

Fungsi partai politik lainnya diungkapkan oleh Sigit Pamungkas di dalam bukunya yang berjudul *Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia*, menjelaskan bahwa partai politik juga memiliki kategori fungsi yang harus dipenuhi, seperti (a). Fungsi partai di elektorat, dalam fungsi ini partai dituntut untuk memberikan penampilan yang akan menghubungkan individu di dalam proses demokrasi. Hal yang biasa dilakukan dalam fungsi pertama ini seperti, penyederhanaan pilihan bagi pemilih, Pendidikan untuk warga negara, melestarikan identitas dan loyalitas, mobilisasi rakyat untuk partisipasi dalam pemilihan umum. (b). Fungsi partai sebagai organisasi yang melibatkan fungsi dari internal partai politik itu sendiri seperti rekrutmen, pelatihan elit politik, artikulasi kepentingan, agregasi politik. (c). Fungsi partai di pemerintahan, partai politik di dalam fungsi ini lebih dituntut untuk bermain dalam pengelolaan persoalan yang ada di pemerintahan dengan melalui cara pemilihan umum. Di pemerintahan, partai politik memiliki banyak fungsi seperti pemenuhan mayoritas dalam kursi parlemen, sebagai mekanisme dan pengorganisasi kepentingan tiap individu legislator, aktor sentral dalam menentukan kebijakan pemerintahan, oposisi dalam mengembangkan alternatif kebijakan, sebagai penjamin tanggung jawab pemerintah yang nantinya sering berurusan langsung dengan masyarakat, pengontrol birokrasi pemerintahan, stabilisasi pemerintahan dengan membantu masyarakat dalam menyalurkan aspirasi ke pemerintah¹⁸.

¹⁸ Sigit Pamungkas, *Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia*, 2011, Yogyakarta.

1.5.2 Relasi Kuasa

Foucault sebagai pelopor filsuf menjelaskan terkait dengan kekuasaan yang merupakan memiliki satu kesinambungan dengan relasi. Adanya relasi pasti berhubungan dengan adanya kekuasaan¹⁹. Dalam pemikiran Foucault, kekuasaan memiliki posisi dimana-mana dan memiliki kehendak kebenaran yang sama untuk berkuasa. Dalam sudut pandangnya, kekuasaan ini berbeda dengan pemikiran masyarakat terdahulu. Menurut Foucault, kekuasaan tidak dimiliki dan dipraktikkan dalam suatu ruang lingkup dimana banyak posisi yang cukup strategis yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Dalam pemikirannya, Foucault menjelaskan bahwa terciptanya kekuasaan ini tidak datang langsung dari luar namun juga dapat hadir dari hubungan-hubungan dari dalam. Kekuasaan ini selalu terartikulasi melalui pengetahuan dan selalu memiliki efek kuasa. Adanya hubungan antar kekuasaan ini dapat menimbulkan saling ketergantungan antara pihak yang memegang kekuasaan dengan pihak yang menjadi obyek kekuasaan. Kekuasaan terlahir dengan keuntungan sepihak baik untuk diri sendiri maupun untuk kelompok yang diikuti.

Seorang penguasa memiliki kemampuan yang dapat digunakan dalam memainkan peran sosial yang penting di dalam suatu kelompok masyarakat. Adanya kelimpahan materi yang tidak merata di dalam suatu masyarakat ini yang menjadikan

¹⁹ Muji Sutrisno, Hendar Putranto, *Teori-Teori Kebudayaan*, Yogyakarta: Kanisius, 2005. Hlm. 146

kelompok pemilik modal dan kelompok yang membutuhkan modal semakin memiliki hubungan dengan pola yang ketergantungan dan akan menimbulkan sikap kepatuhan²⁰.

1.5.3 Elite Politik

Keller dalam bukunya memberikan prespektif dalam istilah elite yang berarti “memilih” yang menjadi suatu ciri khas, adat, dan grup usia serta para individu yang memiliki posisi dengan kelas atas. Dapat diartikan bahwa elite merupakan kelas tinggi yang terpilih dari lingkungan yang terbentuk karena adanya sebuah pengaruh dari sebagian masyarakat social (Suzanne, 1995). Di dalam bukunya, Keller juga memberikan pemikirannya terkait dengan dua prespektif yang nantinya digunakan sebagai gambaran tentang elite, yakni memiliki sifat moral yang memperlihatkan bahwa elite ini memiliki keistimewaan dan berintelektual. Kedua, elite memiliki sifat fungsional yakni elite yang menata kelompok dari suatu elite. Dalam hal ini, elite juga memiliki arti yang sangat mendalam disebagian masyarakat yakni karena memiliki keistimewaan dalam mengatur kehidupan social bahkan mengatur kaedah hukum sebagai panduan kehidupan masyarakat (Suzanne, 1995). Terbentuknya elite ini ditinjau dari adanya sejarah yang memiliki asumsi bahwa elite memiliki kecenderungan melebar dan kurang terstruktur. Sehingga, Keller dalam bukunya memberikan artikulasi proses terbentuknya elite lebih jelas sesuai dengan peranan yang

²⁰ Roderick Martin, Sosiologi Kekuasaan. Jakarta: Rajawali Press, 1995. Hlmn 98

dibawa. Adapun sesuai sejarah, menurut Keller elit terbagi menjadi lima kasta kelompok.

1. Elite Kasta Penguasa merupakan kelompok yang memiliki struktur kombinasi yang kuat dengan diiringi proses keberlanjutan dari tipe elite dengan muatan peninggalan dari leluhur atau agama.
2. Elite Kasta Aristokrasi merupakan kelompok elite yang berlapis-lapis dan terseleksi dari adanya minoritas diatas kelas masyarakat lapisan bawah. Dalam peranan politik, kelompok ini lebih memilih untuk memiliki jabatan strategis dan tidak memiliki kekuatan yang berpengaruh dalam control social.
3. Estate Pertama termasuk dalam kelompok yang terbentuk dengan adanya proses yang lebih resmi sehingga berkaitan dengan peranan control social dan memiliki kedekatan dengan masyarakat.
4. Kasta Elite Penguasa termasuk dalam kelompok peninggalan dari keturunan kerajaan sehingga tidak difokuskan kepada peranan politik melainkan lebih ke penguasaan secara ekonomis.
5. Elite Penentu merupakan kelompok elita yang memiliki karya alternatif dan mengikuti perkembangan zaman.

1.5.4 Kebijakan Publik

Kebijakan atau yang sering disebut dengan policy yang memiliki konsep yang dijadikan sebagai garis besar dalam sebuah perencanaan dalam pelaksanaan hingga pengerjaan. Carl J Federick memberikan definisi terkait dengan kebijakan yakni

Tindakan yang diusulkan oleh seseorang atau kelompok pemerintah di dalam suatu lingkungan. Dalam proses pengusulan tersebut pastinya mengalami hambatan-hambatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu²¹. Solichin Abdul Wahab juga memberikan pandangan bahwa kebijakan terjadi karena adanya persilangan pendapat yang menjadikan ajang perdebatan oleh para ahli²². Easton juga mendefinisikan bahwa kebijakan public sebagai *the autorative allocation of values for the whole society* yang dibuat oleh pemerintah sebagai pemilik sistem politik dan dapat dengan mudah berbuat sesuatu untuk masyarakat. Karena di dalam definisi yang diberikan oleh Easton, pemerintah merupakan *authorities in a political system* atau penguasa sistem politik yang memiliki tanggung jawab dalam suatu masalah yang nantinya akan diminta untuk mengambil sebuah keputusan untuk masyarakat²³. Dari beberapa definisi oleh pakar diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa definisi kebijakan public merupakan sebuah aturan yang dibuat oleh seseorang maupun sekelompok organisasi yang telah tergabung di dalam pemerintahan guna untuk mengatur kebutuhan dan keinginan masyarakat. Kebijakan public juga diangkat dari permasalahan atau fenomena yang muncul dari keresahan masyarakat itu sendiri yang kemudian ditampung oleh perwakilan rakyat.

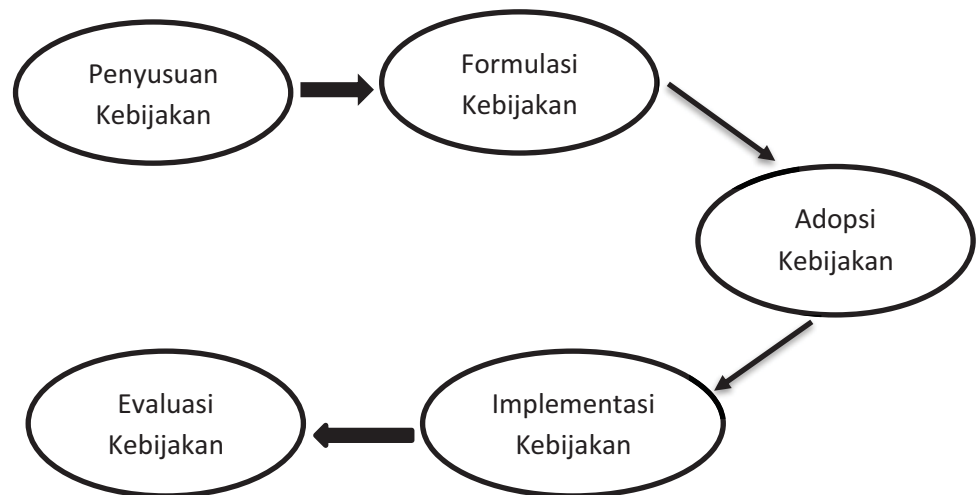
²¹ Kutipan Leo Agustion dari Carl J Federick tentang kebijakan public, 2008, hlm. 7

²² Definisi kebijakan public oleh Solichin Abdul Wahab, 2008, hlm 40-50

²³ Kutipan Leo Agustino dari David Easton tentang Kebijakan Publik, 2009, hlm, 19

Dalam proses penyusunan kebijakan terdapat beberapa kegiatan hingga kebijakan tersebut telah disahkan dan terus menjadi tanggung jawab dari pemerintah yang membuat kebijakan.

Bagan 1.2 Tahap-Tahap Kebijakan



Sumber: William Dun yang diikuti oleh Budi Winarno pada buku Analisis Kebijakan Publik (1990)

a). Tahap Penyusunan Kebijakan

Tahap ini merupakan tahapan pertama yang dilakukan khususnya oleh para pejabat pemerintahan terkait dengan permasalahan di publik yang kemudian nantinya akan masuk kedalam agenda penyusunan kebijakan dari perumusan kebijakan. Tahapan ini difokuskan terkait dengan pembahasan dan latar belakang yang diambil sebagai urgensi dari perumusan sebuah kebijakan

b). Tahap Formulasi Kebijakan

Setelah masuk ke dalam agenda penyusunan kebijakan, kemudian akan dibahas bersama dengan para aktor politik yang duduk di parlemen sebagai penyambung aspirasi masyarakat. Di dalam kegiatan ini biasa dinamakan sebagai agenda setting, yang mana di dalam proses perumusan kebijakan masing-masing akan bersaing mengusulkan kebijakan yang nantinya diambil sebagai pemecah masalah terbaik.

c). Tahap Adopsi Kebijakan

Pada tahap ini, adanya pemilihan kebijakan yang dirasa merupakan kebijakan dengan tawaran yang terbaik menjadi salah satu alternatif kebijakan. Hal ini didukung dengan adanya dukungan mayoritas legislatif, dan keputusan pengadilan.

d). Tahap Implementasi Kebijakan

Pada proses implementasi ini berbagai kepentingan akan mendukung para pelaksana. Proses implementasi kebijakan ini akan dilaksanakan oleh badan pemerintah di tingkat bawah. Proses ini bukan merupakan proses akhir, namun masih ada satu proses lagi yang nanti akan menjadikan hasil dari para legislator atau pengusul.

e). Tahap Evaluasi Kebijakan

Dalam tahapan ini, kebijakan yang telah dijalankan akan menghasilkan sebuah nilai. Nilai tersebut akan dinilai dan kemudian dievaluasi sejauh mana kebijakan ini

dibuat. Evaluasi dari kebijakan ini akan menampilkan dampak yang akan direvisi Kembali oleh pembuat kebijakan.

Proses pembuatan kebijakan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang muncul saat proses pengusulan atau penyusunan kebijakan, antara lain :

- a. Adanya pengaruh tekanan dari luar, yang mana tekanan ini harus sesuai dengan keinginan yang berasal dari luar sehingga Ketika pembahasan akan menjadi sebuah tuntutan.
- b. Adanya pengaruh kebiasaan lama. kebiasaan ini dapat dikatakan sebagai *sunk cost* atau kebiasaan dalam investasi model sehingga mengakibatkan tidak adanya profesionalitas dalam mengambil keputusan kebijakan.
- c. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi. Dalam proses pembuatan kebijakan ini banyak memang ditemui adanya pengaruh yang dibawa oleh sifat pribadi yang memberikan dampak besar dalam penentuan kebijakan.
- d. Adanya pengaruh dari kelompok luar seperti halnya lingkungan sosial dari para aktor pembuat kebijakan.

1.5.5 Pondok Pesantren

Pondok pesantren merupakan tempat institusi Pendidikan yang masih dengan budaya tradisional yang memiliki keunikan dan kekhasan²⁴. Pesantren memiliki kekuatan yang cukup melekat dalam proses menjalankan Pendidikan yang independen tanpa adanya intervensi dari pihak luar lainnya. Adanya kurikulum Pendidikan di dalam pesantren yang dalam hal tersebut menjadikan pesantren sebagai tempat belajar yang cukup berbeda seperti sekolah lainnya. Pesantren memiliki tiga unsur yang saling berkesinambungan satu dengan lainnya, antara lain kiai, santri dan pondok. Ketiga unsur ini saling melekat dan saling melengkapi.

Pesantren dan kiai merupakan bentuk kajian yang menarik dibahas dan diteliti. Hal ini didukung adanya perkembangan teknologi dan zaman yang menjadikan pembahasan peran kiai terhadap pesantren di dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, politik ini bersifat dinamis dan selalu berkembang. Pada bidang politik khususnya, kasus pondok pesantren yang terlibat langsung maupun tidak langsung hingga saat ini menjadi pembahasan yang cukup menarik. Keterlibatan politik dalam pesantren ini tidak lepas dari adanya peran kiai sebagai pemimpin di pesantren yang juga ikut aktif dalam proses politik. Kiai pesantren tidak hanya sebatas memberi restu saja, namun tak jarang terdapat kiai pesantren yang juga aktif sebagai pengurus partai politik²⁵. Hal ini dapat

²⁴ Lingkar Politik Pesantren, Membaca Perubahan Situasi dan Perilaku Kiai Thaun 1971-2014, oleh Vanni MT, MafIA Press, 2017

²⁵ Ibid, hlm 3

dijadikan sebagai pengaruh besar yang dibawa oleh para kiai ke para santri dalam menyikapi isu politik yang ada.

1.6 Kerangka Teoritik

1.6.1 Teori Patronase oleh James C Scott

Teori yang digunakan untuk menganalisis terkait dengan relasi partai politik dengan pondok pesantren ini adalah Teori Patron-Klien milik James C Scott. Alasan peneliti menggunakan teori ini adalah karena kajian dari Scott terfokus pada hubungan antara patron yang menjadi pihak pemilik model dan klien yang menjadi pekerja dan adanya keikutsertaan partai politik yang memiliki hubungan dengan masyarakat dan sebagai peran legislative, yang mana nantinya menjadi suatu variable yang cukup membantu menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan oleh penulis. Scott (1985: 123) menjelaskan bahwa hubungan yang terjadi antara dua individu yang terjalin dalam ikatan patron-klien ini sangat kuat dan cara yang digunakan (klien) untuk membalas budi dengan cara memberikan dukungan terhadap sang pelindung (patron).

1.6.1.1 Konsep Hubungan Patron-Klien

Adapun konsep awal dari terbentuknya hubungan patron-klien menurut James C Scott, antara lain :

a. sumber kekuasaan tidak dapat dibandingkan

dalam teori ini Scott menjelaskan bahwa memang untuk permasalahan kekayaan atau pendapatan yang didapat antara patron dan klien ini tidak dapat di samakan bahkan tidak selalu memiliki kesamaan. Hal ini didorong dengan hal bahwa patron merupakan “orang” yang memiliki kekayaan lebih daripada klien yang hanya sebatas memiliki jasa lebih.

b. hubungan bersifat *personalized*

Scott menjelaskan juga terkait dengan hubungan yang cukup private ini hanya dimiliki oleh sebagai pelaku patron dan juga sebagai pelaku klien. Dan yang perlu digaris bawahi di dalam hubungan ini, bahwa dari kedua nya memang tidak mengikutsertakan “mereka” yang tidak memiliki lingkaran hubungan lebih di dalamnya.

c. dalam mengambil keputusan, harus memberikan keuntungan dan timbal balik.

Salah satu tujuan dari adanya hubungan patron-klien ini memang kurang lebih menciptakan keuntungan dari kedua belah pihak. Keuntungan tersebut tidak selalu berbentuk berupa barang, namun juga keuntungan dalam bentuk jasa. Hanya saja, terkadang di dalam pengambilan keputusan ini bisa jadi dan tidak dapat dipungkiri, untuk pembagian keuntungan pasti ada pihak yang memiliki keuntungan lebih besar.

1.6.1.2 Ciri-Ciri Hubungan Patron-Klien

Hubungan patron-klien juga memiliki ciri-ciri khusus yang diungkap oleh Scott (Suparlan, 2005: 259-260), yakni :

- a. adanya interaksi tatap muka antar pelaku

Interaksi yang diciptakan oleh kedua nya ini biasanya bukan merupakan interaksi yang hanya sekali dilakukan, namun interaksin ini sering kali dilakukan sehingga membuat interaksi antar keduanya lancar.

- b. adanya proses pertukaran barang dan jasa yang tetap berlangsung diantara keduanya,

proses pertukaran keuntungan yang dilakukan kedua belah pihak ini bersifat berkelanjutan dan tidak memiliki batas waktu yang telah ditentukan. Oleh sebabnya, proses pertukaran keuntungan barang dan jasa ini akan terus terjadi. Proses ini akan berhenti apabila salah satu pihak memang memutuskan untuk tidak memiliki hubungan karena tidak menerima keuntungan yang sesuai dengan keinginnya.

- c. dalam proses pertukaran, tidak adanya ketidaksamaan dan ketidakseimbangan dalam hal tukar-menukar barang dan jasa

ciri-ciri selanjutnya yang dikemukakan oleh Scott terkait dengan tidak adanya ketidaksamaan dan ketidakseimbangan dalam hal proses tukar-menukar barang dan jasa. Ciri-ciri ini menjadi pokok dari terjadinya proses patron-klien yang mana seorang patron memiliki barang yang lebih unggul atau lebih besar nilai fungsi atau

kegunaannya yang nantinya akan diberikan kepada klien sebagai orang yang memiliki jasa. Dari adanya ketidakseimbangan inilah yang dapat menjadikan proses patronase akan berlangsung secara terus-menerus.

- d. yang dihasilkan dari proses ketidakseimbangan ini dinamakan proses patron-klien.

Proses patronase yang diungkapkan oleh Scott inilah yang merupakan proses ketidakseimbangan antara kedua belah pihak dan masing-masing akan mencari keuntungan dari apa yang mereka miliki.

Proses terjadinya hubungan patron-klien dinamakan sebagai *clientelism* yang mana terjadi hubungan timbal balik, namun yang paling menikmati hasil ialah sang patron. Dalam proses pertukaran, masing-masing patron dan klien telah memiliki sumber daya yang dapat ditukar satu sama lain dengan nilai keuntungan yang ada. Hubungan patron-klien ini tidak selamanya menitik beratkan klien sebagai *broker* atau *middleman* atau sebagai perantara. Proses hubungan keduanya ini akan terpelihara jika keduanya saling memberikan keuntungan, jika salah satu tidak memberikan keuntungan maka si patron akan mencari klien baru begitu pula juga klien akan mencari patron baru. Barang atau jasa yang ditukarkan nantinya dapat menimbulkan *reward* atau *cost* dalam jangka pendek hingga jangka Panjang. Dengan ini semangat untuk mempertahankan suatu keseimbangan yang memadai pertukaran bahwa keuntungan yang diberikan oleh orang lain harus mampu untuk dibalas (Johnson, 1988).

Mulanya, relasi ini merupakan ciri khas dari relasi antara tuan tanah dan petani dan telah meluas masuk kedalam ranah politik. Kondisi saat ini menjadikan tuan tanah tersebut mengalihkan loyalitasnya kedalam kancah politik kepada birokrat muda, kaum professional, para pemimpin partai yang menggeser posisi dari tuan tanah.²⁶ Scott dalam pemikirannya tentang model politik, memberikan gambaran terkait dengan pemilih dan politisi yang menjadi bentuk relasi antara tuan tanah dan petani. Menurutnya, di seluruh wilayah Asia Tenggara, peran dan posisi petani sebagai penggarap ini memberikan jasa dan tenaganya bagi para tuan tanah yang mereka abdi, dan sebagai bentuk imbalannya para petani ini mendapatkan perlindungan dan bantuan dalam menghadapi kesulitan hidup mereka. Dengan ini membuktikan bahwa peran klien dalam relasi hubungan ini yakni berusaha untuk memperoleh jaminan keamanan dalam kehidupan yang keras dan tidak menentu. Ketika proses politik yakni pemilihan umum masuk ke dalam desa mereka, para klien ini memperoleh sebuah sumber daya politik karena telah memberikan suara mereka untuk kedudukan yang nantinya akan diterima²⁷. Relasi antara patron-klien ini sering disebut dengan patronase atau sebuah pembagian keuntungan di dalam dunia politik untuk mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih sebagai subjek utama dalam bentuk kegiatan politik yang

²⁶ Edward Aspinall dan Ward Berenschot, *Democracy for Sale: Pemilihan Umum, Klientelism dan Negara di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Obor, 2019, hlmn 30-31

²⁷ James C Scott, "The Erosion of Patron-Client Bonds and Social Change in Rural Southeast Asia", *The Journal of Asian Studies* Vol. 32, No. 1 (November, 1972). Lihat juga James C Scott, "Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia", *The American Political Science Review*, Vol. 66, No. 1 (March 1972)

dilakukan saat memberikan dukungan politik²⁸. Patronase juga memberikan uang tunai, jasa, barang dan keuntungan ekonomi lainnya (pekerjaan, jabatan disuatu organisasi atau pemerintahan atau proyek) yang didistribusikan oleh politisi dan termasuk keuntungan yang ditujukan untuk individu dan kepada kelompok atau komunitas²⁹. Imbalan yang klien berikan yakni berupa dukungan dan bantuan kepada patron sebagai bentuk simpati telah menjalin hubungan keduanya.

1.6.1.3 Faktor-Faktor terjadinya Hubungan Patron-Klien

Adapun faktor-faktor yang mendukung terjadinya hubungan patron-klien yang dikemukakan oleh Scott, antara lain :

- a. adanya perbedaan yang sangat menyolok dalam kepemilikan harta kekayaan, status dan kekuasaan yang dimiliki oleh patron dan lebih memiliki kekuatan untuk mendapatkan jabatan dan kedudukan.
- b. tidak adanya pranata yang memberikan jaminan bagi keamanan individu baik perihal status social maupun perihal kekayaan yang ditandai dengan adanya kelangkaan sumber daya dan adanya persaingan yang bersifat *zero-sum* atau keuntungan yang di dapat oleh satu pihak dengan merelakan pihak lain hilang.

²⁸ Martin Shefter,. Political Parties and the State : The American Historical Experience. Princeton University Press: (Princeton:1994) h.

²⁹ Lutfi Wahyudi, Politisasi Birokrasi Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, Jurnal Paradigma, Vol.7 No.3 Desember 2018. H.158.

- c. adanya keberuntungan untuk memajukan diri yang dikarenakan berhentinya ikatan kekeluargaan yang dibangun.³⁰

1.6.1.4 Model Hubungan Patronase Scott

Scott memberikan model-model dari hubungan patron-klien, terdiri dari 5 yakni :

1. Homogenitas (Kesamaan)

Kesamaan di dalam hubungan patron-klien yang dikemukakan oleh Scott ini berbicara mengenai segmentasi pengikut dari patron yang bersifat homogen. Adanya persamaan dalam tujuan antara patron dan klien ini akan lebih memberikan kepatuhan yang bertujuan untuk meningkatkan status masing-masing.

2. Daya Tahan (Kesinambungan)

Daya tahan disini ialah kekuatan hubungan yang dijalani oleh patron-klien untuk memberikan pertahanan kekuasaan. Berafiliasi dengan patron bukanlah keputusan yang sepenuhnya dipaksakan atau bukan merupakan pilihan dengan adanya paksaan, namun yang terpenting terdapat kesinambungan antara faktor-faktor yang telah disepakati bersama. Kesepakatan tersebut biasanya berupa balas budi antara klien dengan patron, pemilihan klien yang akan dilakukan oleh patron, dan yang terakhir jika memang klien sanggup untuk mengelola hasil tanpa bantuan patron.

³⁰ Scott dalam Henddy Shri Ahimsah Putra, Patron &Klien di Sulawesi Selatan, (Yogyakarta: Kepel Press, 2007), h.4.

3. Dominasi Patron

Dominasi patron merupakan ketidaksetaraan dalam pertukaran antara patron-klien. Hal ini dicerminkan dengan adanya perbedaan kelas, kekayaan, kekuasaan, dan status. Klien merupakan seseorang yang telah tergabung di dalam hubungan ini yang mana dia tidak dapat membalas sepenuhnya karena adanya perbedaan yang telah dijelaskan. Pada kenyataannya, hubungan antara patron-klien ini merupakan hubungan keluarga yang mana patron memberikan keistimewaan kepada klien dengan memasok barang dan jasa untuk kebutuhan klien dan keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sebaliknya, klien hanya bisa balas budi atas jasa patron dengan memberikan layanan yang sudah menjadi perjanjian dengan patron dalam hubungan patron-klien.

4. Klien Potensial

Klien memiliki potensi di dalam hubungannya dengan patron. Sumber daya yang diberikan untuk patron meliputi bentuk tenaga kerja, kelompok pendukung politik, maupun kelompok yang loyak melindungi patron. Klien juga berpotensi mengamankan layanan yang dibutuhkan oleh patron.

5. Keseimbangan

Keseimbangan yang dimaksud di dalam posisi ini ialah posisi klien berada diantara sifat sukarela diiringi oleh tekanan hingga paksaan. Paksaan dalam hubungan patron-klien ini memiliki beberapa tingkatan yang didasari oleh kondisi yang membuat tidak ada pilihan lagi untuk klien tidak ikut mendukung patron.

Potensi yang diberikan oleh Partai PKB khususnya pada pesantren ini menjadi cukup memiliki beberapa kemungkinan bahwa hingga saat ini, PKB masih membutuhkan dukungan dari pesantren yang dibangun atas sejarah hingga kepercayaan yang telah ditanamkan. Sebaliknya, pesantren juga membutuhkan bantuan dari kelompok elite atau partai politik yang dapat memberikan aspirasi kepentingan yang pesantren butuhkan khususnya untuk mensejahterakan dan mengembangkan pesantren. Dengan ini maka PKB sebagai partai politik dengan unsur agama dan pesantren yang cukup kental dan erat maka PKB berupaya untuk terus memiliki hubungan baik dengan Kiyai, para Ulama hingga Pondok Pesantren khususnya yang memiliki basis Nahdlatul Ulama. Hanya saja, terdapat pihak ketiga yang memang membantu kelancaran proses hubungan antara patron-klien ini yang mana pihak tersebut merupakan bagian dari non pemerintah atau bahkan pemerintah itu sendiri. Pemilihan teori ini didukung dengan beberapa hal yang menurut peneliti memang relevan, seperti halnya terdapat hubungan yang sangat kental antara PKB dengan pondok pesantren sebagaimana kita lihat bahwa dengan menggunakan teori patronase milik Scott ini diharapkan dapat membantu peneliti untuk memberikan jawaban dan analisa terkait dengan relasi antara PKB dengan Pesantren Syaichona Moh. Kholil dalam mempengaruhi perumusan Raperda Pengembangan Pesantren.

1.7 Metode dan Prosedur Penelitian

1.7.1 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi relasi antara PKB dengan Pesantren Syaichona Moch Cholil Bangkalan. Di dalam hubungan tersebut pastinya akan menghasilkan pola, yang mana berasal dari hubungan antara keduanya. Hubungan patronase yang terjadi di dalam lingkup PKB dengan pesantren Syaichona Cholil dalam mempengaruhi pembentukan raperda Jawa Timur inilah yang menjadi fokus penelitian yang diambil. Penelitian ini menggunakan teori Patronase politik sebagai pisau analisis agar mempermudah dalam menginterpretasikan data yang ditemukan. Fokus penelitian terbagi lagi menjadi dua, pertama terkait dengan proses terjadinya hubungan antara PKB dan Pondok pesantren dalam pembentukan peraturan daerah. Kedua, terkait dengan pola dan bentuk relasi yang tercipta yang dihasilkan oleh keduanya.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Megacu pada judul penelitian Relasi Partai PKB dan Pesantren Syaichona Cholil dalam Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jawa Timur, tentu penelitian ini berlokasi di Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur. Lebih tepatnya, penelitian ini lebih memperbanyak penelitian di dalam Lembaga pemerintahan yang nantinya juga dibantu dengan penelitian di pondok pesantren yang menjadi pendukung atau pondok pesantren yang sempat dijadikan sebagai pendukung PKB yakni Pesantren Syaichona Cholil yang terletak di Jalan KH. Moh. Kholil I No. 6, Demangan, Bangkalan, Madura.

Pemilihan lokasi penelitian di pesantren Syaichona Moch Cholil Bangkalan ini didukung dengan adanya kesamaan ideologi yang dibangun di dalam pesantren. Selain itu, pesantren ini merupakan pesantren yang dapat dikatakan sebagai *icon* dan panutan pesantren di Madura.

1.7.3 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan untuk menginterpretasikan temuan data penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tipe interpretative yang dimana di dalamnya terdapat tiga tipe yang memiliki tradisi berbeda. Dengan penelitian ini, dapat membantu melihat fenomena dan mendalami pengalaman dari objek penelitian. Penulis menggunakan tipe interpretative untuk melihat dan mendalami fenomena sosial yang dialami oleh objek penelitian penulis. Berdasarkan upaya mencari penjelasan tentang fenomena sosial dan budaya dari prespektif orang atau kelompok yang diteliti secara garis besar merupakan sistem sosial perilaku secara detail kemudian dilakukan obeservasi secara langsung. Penggunaan tipe ini dengan alasan bahwa peneliti melihat dan mendalami secara langsung relasi yang terjadi yang dialami objek penelitian yakni partai PKB memiliki hubungan di dalam pondok pesantren.

1.7.4 Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan pihak-pihak yang akan menjadi informan sekaligus narasumber dalam memperoleh data penelitian. Informan ini diharapkan dapat memberikan jawaban tentang pertanyaan yang telah diajukan oleh peneliti dan memberikan data yang akurat untuk penelitian ini. Berikut ini adalah subyek yang akan ditujukan untuk menjadi syarat data dalam penelitian ini adalah dimulai dari unsur Fraksi PKB di DPRD Provinsi Jawa Timur dimana menjadi sumber informan yang cukup kuat terkait dengan usulan Raperda.

Untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan secara lengkap, maka peneliti akan menentukan subjek penelitian sebagai berikut :

Table 1.1 Subjek Penelitian

No	NARASUMBER	KETERANGAN
1.	Penanggung Jawab Panitia Khusus (Pansus) Raperda Pengembangan Pesantren Jawa Timur	Subjek penelitian ini tertuju kepada Pak Mahrus, S.H selaku penanggung jawab Pansus Raperda Pengembangan Pesantren
2.	Pengurus Inti Pesantren Syaichona Moh. Cholil	Subjek Penelitian ini tertuju kepada Kiai/Ulama Besar/pengurus inti di dalam pondok pesantren Syaichona Moh. Cholil. KH. Moh. Nasih Aschal, M.Pd

3.	Perwakilan Anggota Panitia Khusus Raperda Pengembangan Pesantren	Subjek Penelitian ini tertuju kepada Bu Hikmah Bahafiq yang merupakan salah satu anggota dewan Komisi E DPRD Provinsi Jatim yang berasal dari Fraksi PKB. Beliau juga tergabung dalam panitia khusus raperda pengembangan pesantren.
4.	Ketua II Pesantren Syaichona Moh Cholil Bangkalan, Madura	Penelitian ini tertuju kepada Pak Achmad Hafsin yang merupakan Ketua II di Pesantren Syaichona Cholil yang merupakan penanggung jawab Santri Laki-Laki di Pesantren Syaichona Cholil.

Subyek diatas dipilih sesuai dengan pertimbangan untuk mendapat informasi dan data penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan teknik sampel *snowball sampling*, yaitu peneliti akan memilih beberapa orang untuk menjadi informan dalam wawancara penelitian ini. Namun, apabila dalam berjalannya penelitian data dan informasi masih dirasa kurang dan tidak lengkap, maka peneliti akan mencari informan lain yang dipandang lebih memiliki informasi yang lebih lengkap dan jelas agar permasalahan yang ditentukan dapat terjawab secara jelas dan juga menyeluruh.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan cara wawancara yang mendalam secara individual dengan informan kepada peneliti. Informan yang telah dipilih harus dengan pertimbangan dan kriteria tertentu yang sesuai dengan topik permasalahan penelitian. Dalam melakukan teknik ini, peneliti harus mendekati narasumber dengan daftar pertanyaan dan topik yang sesuai dengan permasalahan ini sebelumnya untuk melakukan diskusi, sehingga dapat mengetahui segala responden dan jawaban informan lebih mendalam untuk dapat memberikan informasi dan data penting yang dikemukakan oleh informan. Jika perlu disiapkan untuk melakukan rekaman agar data dapat ditranskrip dengan jelas dan juga akurat. Data dapat dibagi menjadi dua yaitu primer dan sekunder. Data primer adalah hasil dari wawancara mendalam dengan informan (*in-depth interview*), sementara data sekunder adalah data pendukung seperti database yang menunjang penelitian.³¹ Adapun kegiatan yang dilakukan antara lain :

1. Data Primer

Data yang diperoleh ini terdiri dari beberapa kutipan langsung dari orang-orang tentang pemahaman, pendapat hingga pengetahuannya. Penulis melakukan wawancara dengan informan kemudian mencatat dan mentranskrip percakapan dengan informan yang kemudian menjadikan data tersebut sebagai

³¹ Siti Aminah dan Roikan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik* (Jakarta: Pranamedia Group, 2019), hal. 68.

sumber yang akan digunakan dalam menjawab pertanyaan di dalam rumusan masalah dalam penelitian. Penulis menggunakan alat bantu handphone untuk merekam isi suara dari narasumber.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari banyaknya dokumen tertulis yang telah dibukukan atau telah ditulis di dalam web pada internet. Data ini bertujuan sebagai data pelengkap sumber yang akan dibutuhkan di dalam penulisan penelitian. Biasanya data sekunder ini diambil untuk melengkapi terkait dengan sejarah, konsep, hingga teori yang nantinya akan digunakan dalam menganalisa.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dengan cara menemukan dahulu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari informasi langsung yang disampaikan oleh informan yang kemudian dilakukan transkrip, sedangkan data sekunder merupakan data pendukung berupa dokumen. Dalam menganalisis data ini peneliti menetapkan informan yang akan diwawancarai untuk memberikan informasi terkait pertanyaan penelitian. Selanjutnya, peneliti menginterpretasi temuan yang berdasarkan landasan konsep dan teori yang digunakan. Metode yang digunakan yakni dengan metode deduktif yang berasal dari isu-isu yang bersifat umum dan juga berlandaskan teori patronase yang kemudian dibuktikan dengan temuan di lapangan.

Dalam menjawab pertanyaan, melalui analisis data ini menjawab pokok permasalahan yang terjadi. Pertama tentang relasi yang terjadi antara PKB dengan pondok pesantren. Kedua bentuk pola relasi yang terjalin antara keduanya. Ketiga yakni hubungan patron-klien yang nantinya sebagai analisis di dalam relasi antar keduanya khususnya dalam mempengaruhi pembuatan raperda Jatim.